



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGOLAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZMI
2. Jabatan : DIREKTUR PENGOLAHAN
3. NHK : 403022

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.875.080.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di Depok, Rp. 998.040.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Tangerang Selatan, Rp. 597.040.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/- m2 di Depok, Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 330 m2 di Depok, Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 264.000.000

1. MOBIL, Toyota Sienta Mini bus Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 253.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. KAPAL LAUT/PERAHU, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 835.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.974.080.000



III. HUTANG

Rp.

15.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.959.080.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Mei 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.